

RINGKASAN DISERTASI

OPOSISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: SEPENGGAL PENGALAMAN PDI PERJUANGAN (PDIP) DI ERA PEMERINTAHAN SBY-JK

Tuswoyo, disertasi dalam bidang ilmu politik untuk mendapatkan gelar doktor ilmu politik pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Disertasi ini dipertahankan dalam sidang ujian terbuka pada tanggal 4 Juli 2012.

ABSTRACT

Institutionalized opposition parties in Parliament are not only present in parliamentary systems. The relationship between opposition and ruling parties in the presidential systems has different characteristics from that of the parliamentary system. In a presidential system, the relationship between the ruling parties and the opposition parties are more negotiable. In this case, the opposition and the ruling parties are able to produce policies that are more accountable through the mechanism of check and balance. PDIP experience proves that being an opposition party can be effective in a presidential system, in which as opposition party, PDIP can criticize government policy with its ideological vision.

Keywords: *opposition party, presidential system, PDIP*

PENGANTAR

Studi tentang oposisi di Indonesia dapat dijumpai dalam karya Anders Uhlin (1998) *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mizan.. Dalam karya tersebut, ia lebih menyoroti proses demokratisasi dan perjuangan untuk demokrasi yang menjadi karakteristik penting perkembangan politik di sebagian besar dunia, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Karya tersebut berisi analisis terperinci dari gerakan pro demokrasi di Indonesia dan konteks politik di mana ia bertindak. Fokus utamanya adalah bagaimana aktor pro demokrasi di Indonesia menarik pelajaran dari peristiwa di luar negara mereka dan mengadopsi, menyesuaikan, atau menolak ide-ide asing.

Selain itu, juga dalam karya Edward Thomas Aspinall, *Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia* Karya tersebut menyajikan studi oposisi pada dekade menuju akhir rezim

Orde Baru Presiden Suharto yang secara khusus terfokus pada kontribusi kekuatan oposisi terhadap proses demokratisasi politik dan interaksi antara kekuatan-kekuatan oposisi di luar parlemen berikut perpecahan dalam elite pemerintahan.

Berbeda dengan kedua karya tersebut yang lebih menekankan pada peran oposisi di luar parlemen, tulisan saya ini lebih menekankan pada peran oposisi di parlemen yang dijalankan oleh partai politik. Dengan demikian, studi ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari dua studi yang telah dilakukan dua ilmuwan tersebut, ketika proses demokratisasi telah menuju tahap konsolidasi demokrasi. Jika studi Uhlin dan Aspinall terfokus pada peran oposisi yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik di luar parlemen dalam kontribusinya terhadap perubahan politik, studi ini merupakan upaya untuk menjelaskan peran oposisi yang terjadi pada era konsolidasi demokrasi yang diperankan oleh partai politik di parlemen.

Studi tentang peran oposisi di parlemen menjadi penting dilakukan karena sangat terkait dengan upaya untuk memperkuat konsolidasi demokrasi, yang di dalamnya mencakup pelebagaan oposisi sebagai bagian dari pelebagaan politik pada umumnya. Apakah kebijakan oposisi yang dijalankan PDIP di DPR memberi kontribusi bagi pelebagaan oposisi di parlemen, atau sekadar peningkatan *bargaining* untuk membangun kartel politik (Ambardi 2009: 282).

Keberadaan partai oposisi selalu dikaitkan dengan sistem parlementer sehingga ketika PDIP mengambil kebijakan menjadi partai oposisi pada era pemerintahan SBY-JK, banyak pihak melihat secara pesimistik dan cenderung bersikap sinis terhadap upaya PDIP tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan menjadi partai oposisi, terutama setelah PDIP menyampaikan laporan kegiatan oposisinya ke publik, pandangan sinis tersebut secara perlahan berubah dan mendorong PDIP untuk melanjutkan kebijakan oposisinya.

Publik terkesan semakin apresiatif terhadap peran oposisi yang dilakukan PDIP selama pemerintahan SBY-JK. Berbagai kebijakan yang kontroversial di mata publik, seperti penetapan ExxonMobil sebagai *lead operator* Blok Cepu dan kenaikan harga BBM, yang diangkat sebagai studi kasus dalam tulisan ini, memperoleh perlawanan keras dari partai oposisi. Partai oposisi menunjukkan konsistensinya dalam menolak kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat dan tidak nasionalistik tersebut.

Peran kritis partai oposisi di DPR ataupun di forum-forum publik lainnya memang berimbas pada peningkatan apresiasi publik terhadap keberadaan oposisi di DPR. Meskipun apresiasi publik yang muncul tidak berbanding lurus dengan kemenangan PDIP pada pemilu-pemilu berikutnya, tetapi perubahan sikap publik terhadap keberadaan partai oposisi di DPR memberi optimisme tersendiri bagi PDIP untuk tetap menjalankan peran oposisinya di DPR.

Bagaimanapun kontroversialnya keberadaan partai oposisi dalam sistem presidensial, keberadaan partai oposisi dalam negara demokrasi tetap diperlukan. Partai oposisi dapat diperankan sebagai kekuatan penyeimbang untuk mengontrol kebijakan pemerintah, agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Partai oposisi yang dapat diperankan sebagai penyeimbang dan kontrol, tetapi dalam batas-batas yang tidak mengganggu proses politik yang dapat memunculkan imobilitas politik atau *political deadlock* dalam relasi presiden dan DPR.

Pengalaman bangsa Indonesia mempraktikkan demokrasi dengan peran partai oposisi di dalamnya memang sangat minim. Dalam pengalaman yang minim tersebut, peran oposisi yang dijalankan partai-partai politik cenderung mendistorsi penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, ketika PDIP mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi, banyak pihak terkesan kurang sepakat dengan kebijakan politik PDIP tersebut. Kesan tersebut dapat ditangkap dari penolakan terhadap keberadaan partai oposisi yang dianggap tidak memiliki akar sejarah, tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, tidak ada dalam sistem presidensial, sampai pada persoalan yang sifatnya strategis dan teknis.

Dalam persoalan strategis, partai oposisi harus memiliki justifikasi ideologi yang dapat dibedakan dengan orientasi ideologi pemerintah dan dalam persoalan teknis ada kecenderungan bahwa oposisi di parlemen akan mudah terjebak dalam kartelisasi politik karena dengan mudah anggota partai-partai politik melakukan kompromi untuk kepentingan pribadi. Justifikasi ideologi akan memudahkan partai oposisi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah karena dengan adanya perbedaan ideologi antara pemerintah dan oposisi memungkinkan partai oposisi melihat kebijakan pemerintah dalam sudut pandang yang berbeda secara ideologis. Sementara itu, dengan adanya kecenderungan buruk yang dapat terjadi ketika oposisi dijalankan di parlemen, perlu adanya penguatan oposisi di luar parlemen yang diperankan *civil society*.

Bagi PDIP menjadi oposisi bukanlah hal baru karena sejak kelahirannya, PDIP selalu diposisikan sebagai partai oposisi oleh rezim yang tidak mengakui keberadaan oposisi. Akan tetapi, karena pengalaman yang pendek dan “pahit” terhadap peran partai oposisi pada era parlementer, penolakan terhadap wacana oposisi yang dikemukakan PDIP seolah-olah memperoleh pembenaran. Apalagi, selama memegang pemerintahan, PDIP menjalankan kebijakan ekonomi politik yang tidak jauh berbeda dengan yang dijalankan pemerintahan SBY-JK. Hal itu semakin memperkuat anggapan bahwa antara pemerintah dan partai oposisi tidak memiliki perbedaan orientasi ideologi. Dengan perkataan lain, PDIP dianggap tidak layak menjadi partai oposisi karena tidak memiliki justifikasi ideologi yang dapat dijadikan pembeda sekaligus sarana untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah dalam perspektif ideologi.

Persoalannya adalah, apakah benar bahwa oposisi di Indonesia tidak memiliki akar sejarah yang kuat sehingga melembagakan oposisi berarti sebuah upaya yang ahistoris? Berkaitan dengan justifikasi ideologis yang dipersyaratkan untuk menjadi partai oposisi, apakah PDIP dapat memosisikan dirinya sebagai partai oposisi yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan pemerintah? Tulisan ini menjawab persoalan tersebut dengan mengambil pengalaman yang telah dilakukan PDIP selama menjadi partai oposisi pada kabinet SBY-JK.

OPOSISI DAN DEMOKRASI: TINJAUAN TEORETIS

Dalam buku *Regimes and Oppositions*, Dahl (1974: 2–3) menjelaskan bahwa keberadaan oposisi sangat dipengaruhi oleh rezim politik yang menaunginya. Oposisi di dalam rezim hegemonik akan diperankan oleh kekuatan-kekuatan politik di luar parlemen, sebagaimana ditemukan di berbagai negara otoriter, seperti yang diungkap oleh Frederick C. Barghoorn (1974) ketika meneliti oposisi di Uni Soviet. Begitu juga oposisi yang muncul di Indonesia pada era kerajaan dan sebelum era politik etis, oposisi hanya diperankan oleh sekelompok orang yang tidak terorganisasi dan cenderung sporadis.

Di negara yang menganut rezim poliarkhi, oposisi diperankan oleh partai politik dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Dalam hal ini Potter (1968: xviii) membedakan oposisi di parlemen (*Oppositions with capital "O"*) dan oposisi di luar parlemen (*oppositions with little "o"*). Oposisi di parlemen dijalankan oleh partai politik yang tidak memenangkan pemilu, tetapi tidak ingin berkoalisi membentuk pemerintahan. Sementara itu, oposisi di luar parlemen dijalankan oleh kekuatan-kekuatan *civil society*.



Dalam konteks pentingnya partai oposisi di parlemen, Daalder (1968: 235–236) menyatakan.

“... kendatipun di berbagai negara demokrasi modern masyarakat cukup mampu memproduksi kekuatan-kekuatan pengontrol (*countervailing forces*), tetapi kekuatan oposisi di parlemen yang *powerful* dapat menjaga pertanggung jawaban reguler dan menjamin suatu sistem supaya tetap terbuka.”

Itulah sebabnya, diperlukan oposisi yang terlembaga di parlemen sehingga memungkinkan terjadinya keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan DPR. Dalam konteks Indonesia, secara khusus David Bourchier (2000: 39) menjelaskan: “Akan tetapi, karena sistem *checks and balances* secara kronis lemah dalam sistem politik Indonesia, sulit dilihat adanya kekuatan lain kecuali oposisi institusional yang berlaku sebagai pengekang efektif terhadap kewenangan eksekutif.”

Bagi Dahl (1965: 332), oposisi yang diperankan partai politik di dalamnya hanya ada di negara yang menganut sistem demokrasi (poliarki). Dengan perkataan lain, keberadaan partai oposisi sangat erat kaitannya dengan keberadaan demokrasi. Sistem politik hanya dapat dikatakan demokratis kalau di dalamnya terdapat partai oposisi. Sebaliknya, partai oposisi hanya dapat hidup dalam sistem demokrasi. Sebagaimana ditegaskan Dahl (1965: 332) “... *a political party is the most visible manifestation and surely one of the most effective forms of opposition in democratic country,...*”

Dalam hubungan sistem pemerintahan dan partai oposisi, Robert A. Dahl dan Arend Lijphart menjelaskan tentang adanya karakteristik yang berbeda antara keberadaan partai oposisi di negara yang menganut sistem parlementer. Di negara yang menganut sistem parlementer, hubungan pemerintah dan partai oposisi saling berhadapan (*adversarial*) karena pemegang kekuasaan bercirikan eksklusif, kompetitif, dan berhadapan-hadapan (*adversarial*). Di negara-negara yang menganut model demokrasi konsensus dan campuran, seperti Amerika Serikat, pemegang kekuasaan bercirikan inklusif, tawar-menawar (*bargaining*), dan kompromis atau oleh Kaiser dikatakan sebagai “*genotiation democracy*” (Lijphart 1999: 2). Baik dalam model konsensus maupun campuran, oposisi tidak berhadapan-hadapan, tetapi cenderung kompromi dengan partai pemerintah dan bekerja dalam mekanisme *checks and balances*.

Dengan demikian, baik di negara yang menganut sistem parlementer maupun presidensial, partai oposisi tetap ada, dengan asumsi bahwa partai oposisi yang



dimaksud adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Robert A. Dahl (1968: xviii) berikut ini.

“Suppose that A determines the conduct of some aspect of the government of a particular system during some interval. We need not specify the interval exactly; it may be a period in the past, the coming year, etc. Suppose that during this interval B cannot determine the conduct of government; and that B is opposed to conduct of government by A. Then B is what we mean by “an opposition”. Note that during some different interval, B might determine the conduct of government, and A might be “in opposition”.

Partai oposisi tidak bersifat tetap, tetapi dapat saling berganti bergantung pada ada tidaknya dukungan rakyat. Ketika dukungan rakyat dapat memungkinkan partai politik membentuk pemerintahan, partai tersebut akan bertindak sebagai pemegang kekuasaan. Akan tetapi, ketika dukungan rakyat tidak terpenuhi, padahal partai tersebut tidak hendak bergabung dengan pemerintahan koalisi, partai tersebut akan berperan menjadi oposisi.

Partai oposisi dalam sistem presidensial tidak selalu bersikap *adversarial*, tetapi juga dapat melakukan negosiasi dan kompromi terhadap berbagai kebijakan yang menurut pandangannya dianggap perlu dikompromikan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti sebuah politik transaksional karena negosiasi dan kompromi tersebut tetap bermuara pada kepentingan konstituen, bukan pada kepentingan perseorangan atau kepentingan partai semata-mata. Sebuah penjelasan yang menggambarkan keberadaan oposisi di negara yang menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, dapat dilihat dalam penjelasan Dahl (1965: 34) berikut ini.

“Oppositions employ a wide variety of strategies : they combine a heavy emphasis on winning presidential and congressional elections with an equally heavy emphasis on bargaining, logrolling and pressure-groups activities in policy-making.” “Oppositions are not usually very distinctive; they are not even clearly identifiable as oppositions; they melt into the system.” “Oppositions are not combined into a single organization of high cohesion; they usually work through one or both major parties, each of which has rather low internal unity.” “These two parties are highly competitive in national elections but in Congress members of different parties are both competitive and cooperative.” “Oppositions try to gain their objectives by seeking out encounters with policy makers at great variety of official sites—bureaucratic, congressional, presidential, judicial, local, etc”.



Baik di negara yang menganut sistem presidensial maupun parlementer, partai oposisi dapat memanfaatkan setiap perdebatan di parlemen. Perdebatan di parlemen merupakan hal yang sangat penting, karena dapat memengaruhi pandangan publik terhadap kebijakan pemerintah ataupun partai oposisi di wilayah lain. Dalam hal ini, Robert A. Dahl (1988: 133) secara khusus mengemukakan tentang perdebatan di parlemen yang tidak semata-mata untuk memengaruhi parlemen, tetapi lebih banyak dimanfaatkan untuk memengaruhi publik.

Partai oposisi juga dapat memanfaatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik di luar parlemen untuk meningkatkan posisi tawarnya ketika berhadapan dengan pemerintah. Dalam hal ini, Sts. D. Ulrich Koehler (2006) menyarankan beberapa langkah yang dapat dilakukan partai oposisi untuk memperkuat posisi tawarnya tersebut; (i) membangun ikatan organisasi dengan kelompok-kelompok kemasyarakatan guna memperluas basis politik; (ii) menentukan strategi kampanye; (iii). menentukan kelompok target; (iv) mempersiapkan diri dalam pengambilalihan pemerintahan; (v) membangun hubungan dengan organisasi-organisasi sayap.



OPOSISI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS



Pada era sebelum kemerdekaan, perlawanan rakyat terhadap kekuasaan dapat dibagi dalam dua periode, yaitu periode tanam paksa (*culture stelsel*) dan periode politik etis (*etische politiek*). Pada periode pertama, perlawanan muncul sebagai reaksi atas kuatnya tekanan atau adanya penindasan dari pemegang kekuasaan. Sementara itu, pada periode politik etis muncul sebagai bentuk kesadaran politik dari orang-orang yang telah mengalami proses sosialialisasi politik melalui pendidikan pada masa kolonial.

Ketika para ilmuwan membicarakan akar demokrasi di Indonesia, seringkali tindakan protes dari rakyat terhadap raja dijadikan tonggak atau akar dari tradisi perlawanan rakyat terhadap kekuasaan. Salah satunya adalah aksi protes dalam bentuk “*pepe*” atau keluar dari desanya ketika seorang warga tidak setuju dengan kebijakan raja. Deliar Noer (1986: 72) menyatakan bahwa “Kesadaran demokrasi secara tradisional tercermin dalam bentuk rapat-rapat dan sebagainya. Kesadaran itu juga nampak dalam hak *pepe*, semacam hak untuk berdemonstrasi terhadap penguasa bila keputusan atau peraturan penguasa tidak disenangi.” Persoalannya adalah mengapa *pepe* dan sejenisnya merupakan akar budaya berdemokrasi? Padahal *pepe* merupakan aktivitas



protes yang sangat sederhana, bukan sebuah demonstrasi yang terorganisasi, serta dapat memberi tekanan atau kontrol terhadap penguasa.

Aksi protes dalam bentuk *pepe* atau yang lain tentu tidak diorganisasikan dalam partai politik atau kelompok kepentingan, apalagi kelompok yang diakui penguasa pada saat itu. Aksi-aksi perlawanan petani menurut penjelasan J.C. Scott dilakukan secara perseorangan dan tanpa protes dan tanpa organisasi yang teratur (Soehartono 2000: 16). Artinya, dalam aksi tersebut tidak ada arak-arakan, tidak ada yel-yel, para peserta, hanya duduk diam di alun-alun depan kerajaan, tetapi dari sisi aksi sudah cukup nyata karena berlangsung dalam suatu pola hubungan patron-klien yang sangat dipengaruhi oleh konsepsi Jawa mengenai hubungan-hubungan antara *gusti* dan *kawula*, dan antara priyayi dan kaum tani (Anderson 1991: 100).

Peran dan pola kegiatan sosial seseorang sangat ditentukan oleh tradisi dalam bentuk dikotomi tersebut di atas. Pemimpin sebagai sumber inisiatif, sedangkan rakyat dianggap sebagai pendukung yang harus mengikuti putusan para pemimpin. Dalam kenyataan yang demikian, posisi raja sangat menentukan sedangkan rakyat sebagai *kawula* jelas tidak memiliki hak politik sebagaimana lazimnya dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, aksi duduk dan berdiam di alun-alun yang dilakukan warga jelas merupakan tindakan di luar kelaziman atau menjadi anomali bila dikaitkan dengan struktur sosial. Akan tetapi, justru ketidaklaziman itulah yang kemudian mendasari ilmuwan untuk menempatkan aksi *pepe* yang dilakukan warga pada waktu itu, merupakan protes dalam struktur sosial sentralistis dan sistem budaya yang hegemonik. *Pepe* merupakan sebuah aksi yang cenderung menolak, melawan, oposan, meskipun dalam bentuknya yang sangat lemah. Itulah sebabnya sangat layak apabila aksi *pepe* tersebut dimaknai sebagai akar demokrasi atau secara lebih khusus merupakan bentuk oposisi di Indonesia. Fenomena demikian terjadi di berbagai negara otoriter, dan meminjam istilah Robert A. Dahl adalah rezim hegemonik. Oposisi tidak dijalankan oleh partai oposisi secara terbuka, tetapi dilakukan oleh kekuatan-kekuatan sosial atau perseorangan yang menolak kebijakan pemerintah, sebagaimana ditemukan dari hasil studi oposisi di Uni Soviet (Barghoorn 1974: 28).

Parsudi Suparlan (1974: 32) mengemukakan bahwa “Unsur demokrasi dapat dilihat ketika warga desa dapat menunjukkan rasa tidak puas terhadap tindakan lurah melalui *gossip*, yang menyebabkan orang-orang tua yang disegani di desa itu bertindak guna menyelesaikan persoalan.” Cara lain yang dilakukan

rakyat untuk memprotes kebijakan raja ialah dalam bentuk melarikan diri ke hutan, menggabungkan diri dengan raja yang lain, atau membakar diri, mogok makan, semua dalam bentuk kekerasan meskipun ditujukan pada diri sendiri (Simatupang dan Lopian 1978: 4).

Menurut Onghokham (1986: 49) sebelum abad ke-20, politik dan kekerasan atau politik dan pemberontakan di Indonesia hampir mempunyai fungsi yang identik dan perbedaannya samar-samar. Petani lari (pindah), perampok dan *kraman* (pemberontakan) hanya berbeda dalam tingkat membahayakan negara. Dalam setiap pemberontakan besar unsur-unsur itu memainkan peranan besar. Dengan demikian, “gerakan petani dan pemberontakan petani ada gunanya juga sebab baru dengan cara demikian amanat penderitaannya bisa sampai ke atas.” Artinya, gerakan-gerakan sosial tersebut secara fungsional bermanfaat bagi tersalurnya aspirasi rakyat meskipun tidak selalu memperoleh tanggapan dari pemerintah yang berkuasa karena berada pada tingkat yang relatif kurang membayakan bagi negara.

Pada era *culture stelsel* muncul gerakan perlawanan yang lebih terorganisasi dalam bentuk *nggogol* atau mogok. Suatu hal menarik dari perlawanan petani dalam bentuk *nggogol* atau mogok tersebut adalah adanya mekanisme penyampaian aspirasi yang harus dilakukan petani serta model penyelesaian masalah yang disepakati antara petani dan pihak yang mewakili negara (baca: pemerintah Belanda). Dalam *nggogol*, petani berjalan bersama menuju kabupaten dan mengeluh tentang berbagai hal, seperti wajib kerja yang berat, perlakuan sewenang-wenang dari mandor Jawa atau *opzichter* Belanda, dan soal upah (Shiraishi 1997: 23). Biasanya mereka akan menolak perintah bupati untuk pulang sampai keluhan mereka didengar dan bupati menjanjikan adanya perbaikan. Jika bupati tidak menanggapi *nggogol* seperti yang diharapkan petani, mereka beranjak menuju negara dan melakukan *nggogol* di hadapan patih. Oleh karena tindakan ini dianggap sah, asisten residen dan kontroler Belanda juga hadir pada saat *nggogol* bersama bupati untuk mendengarkan keluhan petani dan membentuk *prapat* sebagai penengah antara petani yang protes dan pihak perkebunan. *Prapat* ini terdiri atas dua wakil kedua pihak, yaitu dua petani dan dua lainnya dari pihak perkebunan (karena itu dinamakan *prapat* yang berarti segi empat), dan bekerja di bawah pengawasan resmi.

Sementara itu, meskipun aksi mogok dianggap tidak sah, tindakan ini memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan aksi *nggogol*. Dalam mogok, bupati dan asisten residen Belanda mendatangi para petani yang mogok, mendengarkan

keluhan mereka, lalu membentuk *prapat* untuk menengahi konflik antara petani dan pihak perkebunan. Ketika para pejabat membentuk *prapat*, para petani mulai bekerja dan tidak ada yang ditangkap atau dihukum meskipun mogok dianggap tindakan yang tidak sah. Dalam kedua bentuk protes tersebut, *bekel* sama sekali tidak berperan. Para petani berpaling kepada negara untuk melawan pihak perkebunan yang kuat.

Ditilik dari efektivitas beroposisinya, dalam arti mampu mengubah pandangan para pengambil keputusan dengan memperhatikan tuntutan para pemrotes, dua aksi tersebut relatif lebih efektif daripada tindakan *pepe*. Hal ini disebabkan hubungan antara petani dan perusahaan tidak terkait dengan persoalan-persoalan nilai yang dianut oleh kedua pihak, tetapi lebih rasional karena didasarkan atas kepentingan bersama. Fenomena tersebut menjelaskan betapa persoalan mekanisme penyampaian tuntutan dan model penyelesaian tuntutan telah memperlihatkan bahwa posisi petani tidak semata-mata berada sebagai objek kekuasaan, tetapi subjek yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan nasibnya sendiri sebagaimana yang terjadi dalam negara semidemokrasi. Dalam kenyataan yang demikian, aspek patron-klien, sebagaimana dijelaskan Anderson, dapat dilihat sebagai penghalang bagi proses demokratisasi. Sebaliknya, pola hubungan rasional antara petani penggarap dan pemilik perkebunan menjadi sangat kondusif bagi demokratisasi. Kalau pola hubungan rasional tersebut dilihat sebagai bentuk pengaruh Barat (modernisasi) aksi protes petani yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal demokratisasi juga bersumber dari pengaruh budaya Barat.

Persoalannya memang tidak terletak pada asal mula tradisi protes dalam bentuk *nggogol* atau mogok, tetapi apakah mekanisme tersebut kemudian menjadi pola umum yang disepakati untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara pemilik perkebunan dan penggarap? Kalau fenomena tersebut menjadi pola umum yang digunakan oleh petani untuk mengontrol atau memengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya para pemilik perkebunan, dapat dipastikan *nggogol* atau mogok menjadi sebuah tradisi lain, di luar arus utama (*mainstream*) budaya Jawa yang cenderung menolak model partisipasi nonkonvensional tersebut.

Pada periode politik etis (*etische politiek*), aksi-aksi perlawanan banyak diambil alih atau dimotori oleh partai-partai politik. Melalui Sarekat Islam (SI), yang dipimpin seorang cendekiawan H.O.S Tjokroaminoto, rakyat pribumi dapat meminta dukungan dalam mencari keadilan yang belum pernah mereka

peroleh. Dalam penjelasan Ricklefs (2008: 248), “Rakyat perdesaan tampaknya lebih menganggap SI sebagai alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang kelihatannya monolitik, yang tidak sanggup mereka hadapi daripada sebagai gerakan politik modern”. Bahkan, dalam konteks beroposisi, “SI di beberapa daerah benar-benar menjadi pemerintah bayangan dan para pihak pejabat priayi harus menyesuaikan diri” (Ricklefs 2008: 349).

Dengan berdirinya partai-partai politik, gerakan melawan pemerintah kolonial semakin meningkat. Gerakan perlawanan partai-partai politik ini kemudian mengantarkan mereka untuk membentuk *Volksraad* dengan mendesak pemerintah Belanda menyetujui gagasan tentang lembaga perwakilan politik yang muncul dari Sarekat Islam dan kemudian didukung oleh Budi Utomo (Ricklef 2008: 359–360) Sejak berdirinya *Volksraad* pada 16 Desember 1916, perjuangan partai-partai dalam memperjuangkan gagasan-gagasan politiknya, tidak hanya terbatas pada gerakan massa di luar lembaga resmi pemerintah, tetapi dapat dilakukan melalui *Volksraad* tersebut. Melalui lembaga tersebut, berbagai tuntutan politik disampaikan, seperti petisi Soetardjo yang sangat terkenal.

Kahin (1995: 65–66) menjelaskan bahwa “Adanya lembaga tersebut telah membuat orang bumiputra lebih sadar akan persoalan-persoalan mereka serta hubungan dengan Belanda pada umumnya, dan mendidik khalayak ramai yang melek huruf tentang sasaran-sasaran yang lebih moderat dari pergerakan kebangsaan.” Bagi Kartodirdjo (1993: 48–49), “Dewan Rakyat telah melaksanakan tujuan yang sangat berfaedah, dan telah memberi kepada birokrasi kolonial pertanggungjawaban luas bagi masyarakat kolonial, karena ia harus bekerja secara terang-terangan dan dapat diminta setiap waktu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan aktivitas-aktivitasnya.” Secara umum, keberadaan Dewan Rakyat juga telah memperkuat keinginan untuk memperluas hak-hak politik dan hak pilih untuk selalu dipropagandakan, baik di dalam maupun di luar Dewan.

Gerakan perlawanan yang mengambil jalan nonkooperatif, seperti yang dijalankan PNI dan PKI, juga semakin menguat, apalagi setelah terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 1927, yang anggotanya terdiri atas PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Study Club Surabaya, organisasi-organisasi kedaerahan dan organisasi pemeluk Kristen, yang tujuannya untuk meningkatkan persatuan dan menghindari adanya salah pengertian sesama kaum pejuang kemerdekaan.

Menguatnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial tersebut tidak terlepas dari pengaruh mahasiswa-mahasiswa di Belanda, yang sejak tahun 1925 telah bersatu dalam organisasi kemahasiswaan dengan nama Perhimpunan Indonesia (PI) yang bertujuan memerdekakan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Kahin (1995: 52-53), di samping adanya kenyataan atas berkurangnya inferioritas bangsa Indonesia setelah melihat bahwa ternyata bangsa-bangsa Timur mampu mengalahkan Barat, terutama dalam kasus kemenangan Jepang atas Rusia, menguatnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial mendapat pengaruh dari mahasiswa yang pernah belajar di negeri Belanda.

Selama periode penjajahan Jepang, gerakan perlawanan melalui partai politik tidak dimungkinkan karena Jepang yang berideologi fasisme tidak menerima kehadiran partai politik, apalagi yang beroposisi terhadap pemerintah kolonial. “Dari semua kelompok politik yang dilarang terang-terangan adalah partai politik Islam” (Benda 1980: 142). Oleh karena itu, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik pada waktu itu mengambil bentuk gerakan bawah tanah terutama yang dilakukan kelompok Sjahrir, yang menolak kerja sama dengan Jepang. Dalam menjalankan aksinya, Sjahrir (2000: 260) mencari hubungan dengan kelompok-kelompok Belanda progresif, antara lain dengan de Willinger dan seorang politikus Belanda Jacques de Kadt. Gerakan perlawanan rakyat mulai muncul terkait dengan sikap dan tindakan Jepang yang merendahkan martabat, bahkan penyiksaan terhadap rakyat yang belum pernah diterima sebelumnya. Sementara itu, aksi-aksi mahasiswa anti-Jepang timbul dari rasa kecewa akibat adanya perintah bercukur dan pukulan dengan alasan pedagogi, yang kemudian tumbuh menjadi pembangkangan dan perlawanan yang nasionalistis.

Setelah kemerdekaan, kekuatan oposisi yang diperankan partai politik mulai melembaga, dalam arti disepakati sebagai sebuah proses dengan mana organisasi oposisi dan tata cara beroposisi disepakati. Talcott Parson yang kemudian dikutip Samuel P. Huntington, menyatakan sebagai memperoleh nilai baku dan stabil (Diamond 1999: 16). Pada akhirnya, oposisi yang diperankan partai politik semakin kuat mengontrol kekuasaan. Sebaliknya, kabinet koalisi yang tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di parlemen menjadi terlalu lemah dalam menghadapi kekuatan oposisi.

Pemerintah yang terlalu lemah berakibat pada jatuh bangunnya kabinet sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif. Koalisi yang terbangun

di atas landasan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda, ternyata rentan terhadap berbagai kepentingan elite partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. Pada akhirnya lemahnya koalisi ini membuka jalan bagi kekuatan oposisi untuk menjatuhkan pemerintah. Oleh karena itu, fenomena jatuh bangunnya kabinet yang berakibat pada tidak efektifnya pemerintahan, ditengarai terkait dengan keberadaan sistem multi partai, sistem pemilu proporsional, serta orientasi elite partai yang cenderung mementingkan kekuasaan. Akibatnya, ide tentang oposisi terlembagakan disalahkan atas semakin menajamnya ketegangan sosial (Uhlen 1998: 39).

Pada era berikutnya, kekuatan oposisi mulai melemah dan hal ini terkait dengan peningkatan peran negara, yang berhubungan erat dengan konsep revolusi yang dicanangkan Presiden Soekarno. Dalam hal ini presiden ditempatkan sebagai tokoh sentral dalam kekuasaan, baik secara personal maupun kelembagaan. Pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto ternyata tidak secara otomatis mengubah rezim. Kebijakan otoriter yang dipraktikkan Soeharto terkait dengan konsep pembangunan, yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Akibatnya, kekuatan oposisi, baik yang ada di parlemen maupun di luar parlemen, diperlemah.

Perubahan politik pada akhir 1990-an yang ditandai oleh peningkatan partisipasi masyarakat dan menguatnya peranan kelas menengah, merupakan momentum bagi semakin terbukanya ruang gerak kelompok oposisi, karena pemerintah mulai lebih akomodatif terhadap kelompok kritis yang selama ini diposisikan sebagai *dissident*. Reformasi politik menjadikan kekuatan oposisi untuk memantapkan posisinya sebagai pengontrol kekuasaan.

Setelah Megawati kalah dalam pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, PDIP dan Megawati mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi. Meskipun keputusan menjadi partai oposisi merupakan amalgamasi antara pandangan politik Megawati dan rasa sakit hatinya terhadap pencalonan SBY, tidak dapat dimungkiri bahwa kehadiran oposisi di parlemen dapat mendinamikkan aktivitas DPR dalam menjalankan peran kontrolnya terhadap pemerintah. Pentingnya kehadiran oposisi di parlemen juga terkait dengan penataan kelembagaan politik, karena melalui pemilu dan peranan partai oposisi di parlemen, perubahan dapat berlangsung secara bertahap dan bersumber dari kesepakatan bersama antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Pada akhirnya, rezim tersebut akan semakin dapat memformulasikan respons-respons kebijakan terhadap masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat karena para politisi lebih

mungkin mau bekerja sama satu sama lain dan oposisi akan lebih loyal serta bertanggung jawab (Diamond 1999: 97). Bagi partai oposisi, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan ketika kebijakan tersebut dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi yang menjadi *platform* perjuangan politiknya.

OPOSISI PDIP: SEBUAH ANALISIS

Setelah kalah dalam Pileg dan Pilpres tahun 2004, Megawati selaku Ketua Umum PDIP mendeklarasikan diri sebagai partai oposisi, dengan melarang kader-kadernya duduk dalam kabinet SBY-JK. Dalam menindaklanjuti deklarasi tersebut, PDIP mempersiapkan diri untuk menyusun kebijakan beroposisinya, yang kemudian dituangkan dalam Format Oposisi PDIP, yang di dalamnya mencakup dasar dan orientasi kebijakan PDIP menjadi partai oposisi.

Rupanya penyusunan Format Oposisi PDIP tersebut juga telah mengakomodasi berbagai perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat, khususnya terhadap beberapa pihak yang pesimistik terhadap beroposisinya PDIP. Salah satunya berkaitan dengan justifikasi ideologi yang dapat dibedakan dengan ideologi pemerintah. Seperti dinyatakan dalam Format Oposisi PDIP, bahwa: “Oposisi dilakukan terhadap kinerja pemerintah berupa kritik terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat (tidak prorakyat) dan mengajukan alternatif yang menguntungkan rakyat (prorakyat)” (Format Oposisi PDIP 2005–2009). Penekanan pada kepentingan “*wong cilik*” tersebut sekaligus menjelaskan sikap politik PDIP yang tidak lagi berorientasi liberal sebagaimana yang pernah dilakukan PDIP ketika memegang pemerintahan. Hal itu sekaligus merupakan justifikasi ideologis PDIP sebagai partai oposisi yang menjadikan orientasi kerakyatan sebagai pijakan beroposisinya.

Kongres Bali tahun 2005 yang menetapkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar kebijakan beroposisi, menyadarkan elite PDIP bahwa melalui kebijakan reposisi (kembali pada orientasi kerakyatan) itu lebih memungkinkan mereka untuk mendekati konstituen yang dikecewakan saat PDIP memegang pemerintahan. Melalui kebijakan reposisi, PDIP berupaya menjelaskan kepada publik tentang orientasi barunya setelah selama berkuasa cenderung berorientasi liberal. Pada ranah ideologi, sebagaimana diamanatkan pada Kongres II PDIP tanggal 28 Maret s.d. 1 April 2005 di Bali, kebijakan menjadi partai oposisi dimaknai sebagai kembali pada nilai-nilai kerakyatan dan orientasi ekonomi nasionalistik, yang menjadi *concern* Bung Karno sebagai penggali Pancasila.

Dalam konteks orientasi kebijakan ekonomi, seperti dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, akan tampak adanya aspek kesejahteraan sosial yang menjadi prinsip dasar dari bangunan perekonomian negara Indonesia (Assiddhiqie 2010: 219). Di samping itu, penolakan terhadap investasi asing dan modal asing merupakan refleksi dari sikap berdikari dalam bidang ekonomi. Hal itu merupakan sebuah konsep ekonomi nasionalistik yang memberikan peran pada negara dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Sri Adiningsih (2012: 81–82) menjelaskan

“Pentingnya perencanaan ekonomi oleh negara menjadi kebijakan Bung Karno dengan dibuatnya Dewan Perancang Nasional yang akhirnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), agar pembangunan bangsa Indonesia direncanakan dan dipimpin oleh pemerintah atau negara bersama semua komponen bangsa”.

Kalau mengikuti penjelasan Revrison Basir (Seminar, 28 April 2009) tentang peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, tampaknya PDIP berupaya menegakkan konstitusi yang mengatur perekonomian negara. Negara diharapkan berperan dalam mencegah adanya dominasi asing karena akan berakibat buruk bagi kedaulatan bangsa di bidang ekonomi. Bagi PDIP, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, khususnya mengenai “dikuasai oleh negara” dan “dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” telah dirumuskan secara final dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah menjadi dasar hukum dan perundang-undangan, yang wajib menjadi prinsip dan konsep segala kebijakan penyelenggara negara. Ketika kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, PDIP akan mempersoalkannya.

Dari penjelasan tersebut, elite PDIP ingin menyatakan bahwa kebijakan beroposisinya bukan semata-mata ditujukan pada pemerintah, tetapi pada kebijakannya yang lebih pro-pasar daripada pro-rakyat. Beroposisi, dengan demikian, merupakan pilihan politik ketika PDIP yang berorientasi kerakyatan harus melawan pemerintah SBY-JK yang dalam pandangan elite PDIP berorientasi neoliberal. Dalam hal ini, PDIP berupaya untuk menjustifikasi kebijakan beroposisinya dengan ideologi kerakyatan, yang tentunya dapat diperlawankan dengan ideologi neoliberal yang menjadi dasar kebijakan pemerintah.

Penempatan pemerintah SBY-JK sebagai pemerintahan yang berorientasi liberal bukan tanpa dasar. Seorang guru besar ekonomi dari UGM Mubyarto

menyatakan, “Terus terang kita bertanya-tanya ke mana sebenarnya arah keberpihakan pemerintah ini... Pemerintah (SBY-JK,—pen) sangat tidak suka kalau dikatakan liberal. Akan tetapi, sepertinya negara yang paling liberal dan membuka seluruh pasarnya adalah Indonesia” (Mubyarto 2005: 138). Beberapa indikator lain yang sering digunakan publik ataupun elite PDIP dalam menilai orientasi kebijakan pemerintah yang neoliberal adalah masuknya ke dalam kabinet SBY-JK beberapa teknokrat yang selama ini dikenal sebagai pendukung kebijakan ekonomi politik liberal. Mereka adalah Boediono, yang menjabat sebagai Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Hal lain yang dapat dijadikan bukti atas pandangan elite PDIP terhadap pemerintah SBY-JK yang diposisikan sebagai pendukung kebijakan neoliberal dapat ditemukan dalam pernyataan terbuka dari salah seorang kader PDIP Aria Bima berikut ini, “... Munculnya SKB Tiga Menteri dalam Penetapan UMR 6% adalah bukti bahwa rezim Yudhoyono-Kalla sangat neoliberal” (Aria Bima dalam *Suara Merdeka* 4 November 2008).

Masuknya beberapa pemikir/teknokrat neoliberal ke dalam kabinet SBY-JK, semakin membuka peluang bagi upaya PDIP untuk memosisikan dirinya sebagai partai oposisi yang memiliki orientasi nasionalis kerakyatan. Pada titik inilah, kemudian PDIP dapat mengklaim sebagai partai oposisi yang memiliki justifikasi ideologi yang diperlukan dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik yang diambil pemerintah SBY-JK.

Mengenai posisi ideologi pemerintah SBY-JK, yang oleh elite PDIP dianggap berorientasi liberal, dapat dilihat dalam dokumentasi *Steering Committee* yang dipersiapkan untuk Kongres PDIP di Bali yang secara tegas menyatakan bahwa “Rezim berkuasa menggunakan ideologi liberal dalam pengelolaan negara-bangsa. Untuk itu, PDIP mengangkat kembali konsepsi Bung Karno tentang Tri Sakti, sebagai dasar pijakan untuk memberikan orientasi kebijakan ekonomi politiknya dalam menghadapi pemerintah” (Dokumen *Steering Committee* 7 April 2010).

Melalui orientasi barunya, PDIP telah memiliki justifikasi ideologis yang dapat dipertentangkan dengan orientasi ideologi neoliberal yang dijalankan pemerintah. Dengan demikian, tampak adanya perbedaan cara pandang antara partai oposisi dan pemerintah. Perbedaan cara pandang itu tampak dalam beberapa isu yang terkait dengan perbedaan orientasi tersebut, secara khusus tampak pula dalam kasus Blok Cepu dan kebijakan kenaikan harga BBM. Partai

oposisi melihat dua kasus tersebut dalam perspektif nasionalis-kerakyatan, berhadapan dengan pemerintah yang memandangnya dari perspektif internasionalis-liberal. Perbedaan cara pandang tersebut membuat partai oposisi dan pemerintah saling berkompetisi untuk memengaruhi partai-partai politik di DPR dan konstituen di luar parlemen.

Suatu hal yang menarik adalah persoalan isu publik yang dipertentangkan antara pemerintah dan partai oposisi. Baik partai oposisi maupun pemerintah, keduanya berusaha untuk menutup peluang kompromi. Misalnya saja dalam kasus Blok Cepu, pemerintah mencoba untuk melokalisasi pembentukan Tim Negosiasi yang dibentuk untuk menindaklanjuti perundingan Blok Cepu, yang oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dikatakan bahwa pembentukan Tim Negosiasi merupakan ranah eksekutif. Padahal, DPR mempersoalkan pembentukan Tim Negosiasi yang tidak melibatkan Direktur Utama Pertamina. Akibatnya, hal ini semakin memicu sikap perlawanan dari partai oposisi.

Sementara itu, partai oposisi yang begitu bersemangat untuk meyakinkan konstituen bahwa partainya telah kembali pada jati dirinya sebagai partai nasionalis-kerakyatan, melakukan *walk out* ketika Presiden mengundang beberapa partai ke Istana untuk membicarakan kebijakan pemerintah tentang Blok Cepu. Bagi PDIP tidak ada kompromi terhadap pemerintah yang menjalankan kebijakan yang tidak nasionalistik.

Perbedaan ideologi pada akhirnya memang menyulitkan bagi adanya kompromi, seperti yang ditunjukkan partai oposisi PDIP yang sejak awal telah mengambil sikap yang berhadapan (*adversarial*) dengan pemerintah sehingga memberi kesan bahwa PDIP apriori terhadap kenaikan harga BBM. Sikap apriori dan tidak mau kompromi diperlihatkan oleh empat wakil dari Fraksi PDIP yang melakukan *walk out* ketika DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Presiden, dengan alasan rapat dilakukan secara tertutup. (Laporan Kepada Rakyat: 4 Tahun Beroposisi: 178). Sikap apriori juga dapat dilihat dalam sikap PDIP atas kebijakan BLT yang sangat kontraproduktif bagi PDIP sendiri.

Pemaparan tersebut sekedar contoh untuk menjelaskan alasan terjadinya pola hubungan yang *adversarial* antara pemerintah dan partai oposisi. *Pertama*, tidak semata-mata disebabkan oleh adanya fakta bahwa beroposisinya PDIP karena sakit hati Megawati terhadap SBY, dan *kedua*, bahwa PDIP berkepentingan untuk meyakinkan konstituen bahwa PDIP telah kembali pada jati

dirinya sebagai partai nasionalis-kerakyatan. Intinya, pola hubungan *adversarial* tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh sikap “*waton suloyo*” (asal beda) yang ditunjukkan oleh elite-elite PDIP dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga disebabkan oleh sikap pemerintah yang cenderung menutup peluang bagi partisipasi DPR. Hal serupa terjadi pada Kasus Aceh-MoU Helsinki, yang membuat pemerintah dan oposisi saling menutup diri dan apriori.

Bagaimana peran partai oposisi PDIP dalam mendebat dan memanfaatkan perdebatan-perdebatan di DPR untuk memengaruhi partai-partai politik di DPR ataupun masyarakat di luar parlemen ? Dalam beberapa isu, PDIP mampu menarik dukungan dari beberapa anggota partai yang selama ini dikenal sebagai pendukung koalisi, meskipun kemudian dukungan tersebut berhenti di tengah jalan. Perubahan dukungan dari partai-partai kecil terkait dengan kepentingan partai dan orientasi pragmatis partai tersebut. Penyebab lain ialah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kepentingan bersama sebagai pendukung koalisi pemerintah.

Pada dasarnya PDIP juga berupaya memanfaatkan perdebatan publik untuk kepentingan sosialisasi politik ke publik. Akan tetapi, upaya tersebut belum optimal sehingga PDIP selalu gagal dalam kontestasi di ruang publik di mana pemerintah memang *concern* terhadap pencitraan. Salah satu contoh adalah kebijakan BLT, yang kemudian justru dijadikan senjata kampanye partai pemerintah untuk menarik massa, dan dalam isu Blok Cepu, pemerintah dapat memengaruhi rakyat di seputar Blok Cepu yang pada awalnya menolak Pertamina yang didukung PDIP.

Optimalisasi peran partai oposisi dalam memanfaatkan forum-forum perdebatan di parlemen untuk menyosialisasikan kebijakannya, juga dipengaruhi oleh adanya aturan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada oposisi. Pada waktu itu UU keterbukaan informasi publik belum diundangkan sehingga perhelatan politik di DPR dapat dilakukan secara tertutup, dan bergantung pada keputusan DPR melalui paripurna. Dalam pelaksanaan angket BBM, karena PDIP gagal untuk mendorong agar rapat tersebut dilakukan secara terbuka sehingga isu yang begitu populer tidak dapat dimanfaatkan partai oposisi PDIP untuk menarik dukungan dari kekuatan oposisi di luar parlemen. Selain itu yang terjadi pada pelaksanaan hak angket bahan bakar minyak (BBM) tahun 2012, yang kemudian dapat memberi tekanan yang begitu kuat terhadap pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM.

Persolaan lain adalah lemahnya dukungan keuangan bagi pemanfaatan media massa. Setelah empat tahun beroposisi, PDIP menyadari bahwa kerja kerasnya sebagai partai oposisi tidak banyak diketahui masyarakat. Untuk itu, PDIP berupaya membuat laporan kepada rakyat untuk disampaikan ke publik melalui media massa. Strategi ini dianggap cukup membantu sosialisasi kebijakan oposisinya, tetapi untuk melanjutkan program pemasangan iklan melalui media massa ternyata membutuhkan dana yang tidak kecil. Keterbatasan keuangan memaksa PDIP untuk menghentikan sosialisasi kebijakannya. Inilah problem beroposisi di negara yang menganut sistem presidensial karena pimpinan partai oposisinya tidak memperoleh insentif apa pun dari pemerintah. Dalam sistem parlementer, pimpinan oposisi digaji dan melalui *shadow cabinet* yang dibentuk. Mereka dapat memperoleh dana dari pemerintah.

Dalam berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh Fraksi PDIP terhadap pemerintah, tampak sekali bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan refleksi ideologi PDIP sebagai partai yang berusaha untuk memperhatikan nasib *wong cilik*. Misalnya, dalam salah satu rekomendasinya, Fraksi PDIP mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program padat karya melalui perbaikan infrastruktur di perdesaan, pemberian stimulus pertumbuhan di sektor pertanian dan sektor lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, serta pencadangan untuk melakukan intervensi atas ketidakadilan pasar akibat liberalisasi.

Kalimat terakhir berupa “melakukan intervensi atas ketidakadilan pasar akibat liberalisasi” yang digunakan dalam rekomendasi tersebut cukup menjelaskan kepada publik akan model ekonomi politik yang didukung PDIP, yaitu model intervensi negara, dan mengurangi seefektif mungkin liberalisasi yang dianggap berdampak terhadap ketidakadilan. Hal itu merupakan sebuah refleksi ideologi dari partai pendukung gagasan intervensi negara sekaligus refleksi kebijakan reposisi yang menekankan pada kepentingan *wong cilik*.

Kenyataan lain terkait dengan peran oposisi yang diharapkan dapat semakin memperbaiki kebijakan pemerintah, sehingga lebih pro rakyat. Hal ini disampaikan melalui berbagai alternatif pemikiran. Dalam kenyataannya, sedikit sekali ditemukan adanya alternatif kebijakan yang secara akurat dapat diunggulkan dari kebijakan yang digulirkan pemerintah. Fenomena ini sangat terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan organisasi oposisi, yang memungkinkan partai oposisi menjalankan perannya secara lebih optimal. Itulah sebabnya, Pataniari Siahaan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI,

menjelaskan tentang perlunya peningkatan kemampuan anggota DPR karena dalam kenyataannya kurang dari 30% anggota yang mengerti penyusunan Undang-Undang (Laporan Kepada Rakyat: 4 Tahun Berposisi 2009: 69).

Namun, ada pula yang membantah bahwa argumentasi yang disampaikan tidak bermutu. Kandasnya argumentasi-argumentasi yang solutif tersebut lebih disebabkan oleh adanya kekuatan lain yang kerap bermain secara dominan sehingga mengalahkan etika dan akal sehat. Sebagaimana dalam penjelasan Bambang Wuryanto bahwa “Pada akhirnya banyak sekali isu-isu sentral yang dikritisi PDIP selalu mandek di tengah jalan” (Bambang Wuryanto dalam Laporan Kepada Rakyat 2009: 5). Dalam penjelasan Tjahjo Kumolo dikemukakan, “Banyak gagasan Fraksi PDIP yang kemudian menang dalam arti diterima partai-partai lain di Komisi, tetapi kalah di paripurna karena peran politik JK” (Laporan Kepada Rakyat 2009: 13).

Dari kebijakan-kebijakan yang ada, terdapat beberapa kebijakan yang kemudian melahirkan usulan hak interpelasi dan hak angket. Usulan angket meliputi kebijakan kenaikan harga BBM, lelang gula ilegal, penjualan kapal tanker pertamina, impor beras, dan pengelolaan Blok Cepu. Dari keseluruhan usulan angket hanya kenaikan harga BBM September 2008, dan penjualan tanker Pertamina, yang disetujui menjadi hak angket DPR, sedangkan usulan lain seperti impor beras yang juga dianggap sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, serta pengelolaan Blok Cepu yang dianggap sangat berkaitan dengan penegakan kedaulatan energi, gagal untuk disepakati menjadi hak angket.

Sementara itu, beberapa kebijakan yang diusulkan menjadi hak interpelasi, meliputi penyelesaian kasus Aceh-MoU Helsinki, surat Setwapres tentang arahan Wapres agar menteri tidak menganggap penting raker dengan DPR, penarikan surat Presiden Megawati tentang penggantian Panglima TNI, *teleconference* Presiden dari AS, kasus busung lapar dan polio, kenaikan harga BBM, impor beras I dan II, dukungan terhadap Resolusi PBB tentang Iran, dan kasus Lapindo. Namun yang kemudian diterima adalah dukungan terhadap Resolusi PBB tentang Iran, kasus busung lapar dan polio, serta penyelesaian kasus KLBI/BLBI. Sementara itu, yang bersentuhan langsung dengan misi perjuangan PDIP, kalau dicermati hanya persoalan Aceh yang mengutamakan NKRI, dan busung lapar dan polio, impor beras, serta Lapindo, yang bersentuhan langsung dengan misi perjuangan PDIP.

Isu yang diperdebatkan di DPR cukup memberikan bukti bahwa oposisi PDIP bukan semata-mata meningkatkan *bargaining position* guna membangun kartel politik untuk mengambil keuntungan dari transaksi politik. Meskipun tidak dapat dimungkiri, terdapat oknum yang mencoba memanfaatkan posisi politik PDIP di DPR guna melakukan *profit taking*, seperti yang terjadi dalam kasus pemilihan Deputy Gubernur BI yang kemudian menjeboskan beberapa kader PDIP.

Persoalan yang mempertanyakan sejauh mana efektivitas partai oposisi dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh perimbangan kursi antara partai-partai pendukung koalisi yang berhadapan dan partai oposisi. Dengan perimbangan kursi 403 koalisi dan 109 partai oposisi serta 38 partai netral, sebenarnya kekuatan oposisi tidak terlalu signifikan untuk mengontrol kekuasaan, apalagi menjatuhkan pemerintah melalui jalur pemakzulan atau *impeachment*. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk khawatir dengan pemakzulan yang dilancarkan oposisi, seperti dalam kasus kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM. Beberapa partai koalisi mendukung angket BBM, meskipun ketika hak angket itu hendak ditingkatkan ke penggunaan hak menyatakan pendapat, beberapa partai pendukung pemerintah tidak lagi mendukung oposisi.

Dengan alasan untuk mempertahankan keutuhan koalisi, beberapa anggota partai kecil, seperti PKS dan PAN, beralih bahwa dukungan terhadap penggunaan hak angket BBM semata-mata untuk membongkar “Karut-marutnya” tata niaga migas (minyak dan gas bumi) di Indonesia yang ditengarai menjadi penyebab bagi penurunan *lifting* produksi.

Dalam kasus Blok Cepu, partai oposisi gagal menarik dukungan dari partai-partai kecil untuk meningkatkan penggunaan hak interpelasi ke dalam hak angket, karena partai-partai kecil tetap berkomitmen untuk menjaga keutuhan koalisi. Meskipun ada sinyalemen bahwa dalam proses tersebut telah beredar “uang pelicin” di DPR yang kemudian sangat besar pengaruhnya bagi perubahan sikap beberapa anggota partai kecil tersebut.

Dengan jumlah suara yang terbatas, peran partai oposisi tidak akan memacetkan hubungan politik (*political deadlock*) dalam hubungan presiden-DPR. Akan tetapi, dengan kemampuan partai oposisi memengaruhi beberapa partai yang tergabung dalam koalisi, memungkinkan berbagai kebijakan pemerintah dapat dikontrol oleh partai oposisi dengan menggunakan hak-hak yang

melekat dalam lembaga DPR. Sebagai contoh, kasus Bank Century memaksa pihak pimpinan utama koalisi untuk mengonsolidasi kekuatan koalisi melalui pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab).

Partai oposisi dapat memengaruhi sebagian anggota DPR dari kelompok koalisi, dalam beberapa kasus, seperti kenaikan harga BBM, interpelasi impor beras, hak angket Blok Cepu, dan hak angket kasus Century. Akibatnya, meskipun dari sisi perimbangan kursi di DPR sangat tidak berimbang, koalisi pemerintah (403 kursi) dibanding kekuatan oposisi (109 kursi), partai oposisi dapat menjalankan peran kontrolnya terhadap kebijakan dengan mempersoalkan kebijakan itu di DPR melalui penggunaan hak politik yang melekat dalam lembaga tersebut. Pada akhirnya keterbatasan kekuatan oposisi memang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *political deadlock* dalam hubungan presiden-DPR.

Bukan hanya itu, keinginan partai oposisi untuk mengarahkan penggunaan hak-hak yang melekat dengan lembaga legislatif sebagai pintu masuk untuk melakukan pemakzulan juga sulit dilakukan. Partai-partai kecil pendukung koalisi akan berpikir sekian kali untuk mendukung partai oposisi melakukan pemakzulan, karena keberhasilan partai oposisi untuk melakukan pemakzulan tidak secara otomatis dapat memperbaiki posisi politiknya di kabinet.

Suara PDIP yang terbatas di parlemen, memang sulit untuk menggunakan hak-hak yang melekat di DPR sebagai pintu masuk “menghentikan” pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi melalui jalan pemakzulan. Namun, PDIP dapat mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi nasionalis-kerakyatan yang dijadikan *platform*-nya. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat seperti kebijakan kenaikan harga BBM, dan kebijakan yang dianggap tidak nasionalistis seperti penetapan ExxonMobil sebagai *lead operator* Blok Cepu, dapat dipersoalkan dan diangkat ke ruang publik.

Akibatnya, pemerintah tidak begitu saja mengambil kebijakan yang penting bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan pandangan partai oposisi. Ketika pemerintah SBY-Boediyono mengagendakan kembali kebijakan penarikan subsidi BBM, partai oposisi mampu meningkatkan dukungan publik yang cukup signifikan. Sebagai akibatnya, partai-partai pendukung koalisi harus berpikir ulang untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Meningkatnya dukungan publik tidak terlepas dari semakin diterimanya keberadaan oposisi

di DPR, disamping karena isu tersebut memang sangat berimpit dengan kepentingan rakyat.

Peran kontrol dan perimbangan yang dijalankan partai oposisi semakin meningkat bersamaan dengan semakin diterimanya keberadaan partai oposisi di DPR. Pada saat PDIP menyatakan diri sebagai partai oposisi, terjadi peningkatan apresiasi publik yang cukup positif. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta politik di Indonesia (Maret 2007) menunjukkan bahwa popularitas PDIP, yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi, cenderung meningkat, bahkan berada pada posisi pertama (19,7%), menggeser posisi Partai Golkar (15%) dan Partai Demokrat (10%). Kemudian persentase hasil survei meningkat lagi ketika pada tahun 2008 partai oposisi PDIP mempersoalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Berdasarkan Survei Indo Barometer, kenaikan tersebut cukup signifikan karena pada Mei 2007 popularitas Megawati 22,7% (SBY 35,3%), Desember 2007 Mega 27,4% (SBY 38,1%), menjadi Mega 30,4% (SBY 20,7%) pada Juni 2008. Naiknya popularitas pimpinan partai oposisi Megawati merupakan dampak kebijakan kenaikan harga BBM pada 5 Juni 2008.

Berbagai kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa peran oposisi yang dijalankan PDIP selama pemerintahan SBY-JK memperoleh apresiasi positif dari masyarakat. Hal itu akan berpengaruh besar terhadap pelembagaan oposisi di parlemen, meskipun belum berpengaruh secara signifikan terhadap kesanggupan PDIP mengimbangi perolehan Partai Demokrat pada pemilu 2009.

PENUTUP

Dasar pertimbangan PDIP menjadi partai oposisi semata-mata memang tidak bersifat rasional, tetapi juga emosional. Pertimbangan rasionalnya adalah kepentingan PDIP untuk mendekati konstituen, dengan jalan menjadi partai oposisi. Konstituen dapat lebih jelas membedakan kebijakan yang diusulkan pemerintah dan kebijakan yang disampaikan partai oposisi sebagai bentuk alternatifnya, maka dengan menjadi partai oposisi akan memudahkan bagi konstituen untuk mengetahui kebijakan yang diusulkan PDIP sebagai partai oposisi. Dengan mengetahui kebijakan alternatif yang disampaikan PDIP, konstituen dapat menilai orientasi politik PDIP setelah menjadi partai oposisi, yaitu kembali pada jati dirinya sebagai partai yang berideologi nasionalis kerakyatan.

Hal yang berifat emosional, terkait dengan rasa sakit hati Ketua Umum PDIP Megawati terhadap SBY yang telah mengalahkannya pada pemilu 2004. Persoalan yang sifatnya emosional tersebut memang tidak mengurangi peran PDIP sebagai partai oposisi, tetapi justru memperkuat kecenderungan untuk mempersoalkan setiap kebijakan yang diusulkan pemerintah ke DPR. Dalam sistem presidensial, pengaruh emosi tersebut dapat mendistorsi relasi presiden-DPR yang seharusnya berada dalam mekanisme *checks and balances*, yang di dalamnya terdapat kompromi-kompromi untuk memecahkan permasalahan secara bersama. Relasi presiden-DPR menjadi terkesan saling berhadap-hadapan layaknya dalam sebuah sistem parlementer.

Dalam hal implementasi kebijakan oposisi, PDIP senantiasa berupaya untuk konsisten dengan orientasi barunya. PDIP selalu menggunakan visi nasionalis-kerakyatan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan seringkali menjadi persoalan tersendiri ketika dengan orientasi tersebut PDIP memandang kebijakan pemerintah dianggap bertentangan. PDIP yang kuat berpegang pada ideologi nasionalis-kerakyatan, pada akhirnya berhadapan dengan pemerintah yang memiliki kecenderungan neoliberal.

Pada akhirnya, oposisi PDIP cenderung mengarah ke pola oposisi partai politik dalam sistem parlementer dengan sistem dwipartai, yaitu antara partai oposisi dan pemerintah terkesan saling berhadap-hadapan (*adversarial*) dalam berbagai isu yang dipersoalkan.

Peluang untuk kompromi terkendala oleh kuatnya orientasi ideologi pasca reposisi, serta hubungan personal yang kurang kondusif antara presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati, di samping adanya berbagai fakta yang menunjukkan bahwa pemerintah SBY-JK mencoba mengurangi keterlibatan DPR berbagai kebijakan yang diambil.

Penjelasan Robert A. Dahl (1968: 34) ataupun Arend Lipjhart (1999: 2) tentang pola hubungan oposisi dan pemerintah, yang secara teoretis dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada, dalam praktiknya tidak demikian, karena variabel yang memengaruhi pola hubungan oposisi dan pemerintah tidak tunggal.

Studi peran oposisi PDIP memperlihatkan bahwa variabel hubungan personal antara pemimpin partai oposisi dan pimpinan pemerintahan serta kepentingan politik partai yang beroposisi, turut menentukan pola hubungan tersebut. Hal itu dikuatkan dengan pandangan ideologi partai politik yang saling berhadapan.

Artinya, di lapangan telah ditemukan fakta bahwa pola hubungan antara pemerintah dan oposisi, yang *adversarial*, tidak semata-mata dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, perbedaan ideologi, bahkan hubungan personal.

Meskipun temuan tersebut belum cukup untuk menolak proposisi teoretis yang dikemukakan Robert A. Dahl (1968: 34) dan Arend Lipjhart (1999: 2) yang menyatakan bahwa dalam sistem parlementer pola hubungan oposisi dan pemerintah cenderung *adversarial*, dan dalam sistem presidensial pola hubungan oposisi dan pemerintah cenderung *negotiable*, tetapi cukup memberikan bukti bahwa tidak semua praktik beroposisi dalam sistem presidensial cenderung *negotiable*.

Sebagai konsekuensinya, pola hubungan *adversarial* yang terbangun antara partai oposisi dan pemerintah, menjadi kurang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas keputusan yang dihasilkan. Keputusan itu tidak bersumber dari hasil kompromi atau musyawarah antara partai oposisi dan pemerintah, tetapi lebih didasarkan atas ‘menang-kalah’ dalam proses politik di DPR.

Praktik oposisi PDIP dapat dilihat sebagai sebuah penyimpangan. Hal itu disebabkan oleh kecenderungan *adversarial*, rupanya tidak cukup berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan dan sepak terjang PDIP dalam menjalankan peran oposisinya. Sebagai bukti, sejak PDIP menyatakan diri sebagai partai oposisi, popularitas Megawati sebagai Ketua Umum PDIP meningkat. Artinya, meskipun ada sebagian dari anggota masyarakat yang mencela sikap politik PDIP yang dianggap “*waton suloyo*”, dalam kenyataannya masyarakat semakin menerima kehadiran partai oposisi dengan segala kekurangan yang ada padanya.

Dalam jangka panjang, kebijakan menjadi partai oposisi yang dirintis PDIP ini akan besar pengaruhnya bagi pelebagaan partai oposisi di parlemen, yang lebih lanjutnya sangat diperlukan bagi pematangan demokrasi. Ketika masyarakat kemudian menerima dan bahkan mengapresiasi berbagai kebijakan yang dijalankan partai oposisi, perlahan tapi pasti pelebagaan partai oposisi akan semakin menguat. Apalagi ketika kemudian, apresiasi tersebut berujung pada dukungan konstituen terhadap partai oposisi, partai oposisi mampu mengalahkan partai pemerintah dalam pemilu, maka dapat dipastikan proses pelebagaan oposisi akan semakin menguat.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Jurnal

- Adiningsih, Sri. 2012. "Memiliki Jiwa Pendobrak", dalam Fretes de, Yvonne Hastuti Sri, Rita. 2012. *Megawati Anak Putra Sang Fajar*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Anderson, R.O'G Benedict. 1991. "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa", dalam Miriam Budiardjo (edy), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aspinall, Edward Thomas. 2000. *Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule: The Case of Indonesia*. The Australian National University Press.
- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Barghoorn, Frederick C. 1974. "Factional, Sectoral, and Subversive Opposition in Soviet Politics" dalam Robert A. Dahl (ed.). *Regimes and Oppositions*. London: Yale University Press.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bima, Aria. 2009. *Interupsi untuk Rakyat Aria Bima di DPR RI Senayan dalam Rekam Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka Dunia Buku.
- Bourchier, David. 2000. "Pemerintah Peralihan Habibie: Reformasi, Pemilihan Umum, Regionalisme, dan Pergulatan Meraih Kekuasaan", dalam Chris Manning dan Peter van Diermen (ed.), *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, Miriam (eds.). 1975. *Demokrasi dan Pembangunan Politik, dan Masalah Negara*. Seri Bunga Rampai No. 2, FISIP UI. Jakarta: PT Gramedia.
- Daalder, Hans. 1968. *The Netherlands: Opposition in a Segmented Society*. New Haven and London: Yale University Press.
- Dahl, A Robert (ed.). 1965. *Political Opposition in Western Democracies*. New Haven and London: Yale University Press.
- _____. 1974. *Regimes and Oppositions*. London: Yale University Press.
- _____. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- _____. 1988. "Partterns of Opposition" dalam Miriam Budiardjo (edy) *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, dalam Tim IRE Jogjakarta (terj.).
- Kahin, G. McT. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press dan Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Dunia Pustaka Jaya.

- _____. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasenda, Peter. 2010. *John Luminkewas: Merah Darahku, Putih Tulangku, Pancasila Jiwaku*. Jakarta: Presidium Persatuan Alumni GMNI.
- Lijphart, Arend. 1999. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Century*. New Haven dan London: Yale University Press.
- Manangka, Derek. 2002. *Jurus dan Manuver Politik Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mubyarto. 2005. “Subsidi” dalam *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945–1965*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 1986. “Perkembangan Demokrasi Kita”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Onghokham. 1986. “Petani dan Kraton dalam Politik Tradisional Jawa”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1988. *Negara dan Rakyat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Potter, Allen. 1968. *Great Britain: Opposition with a Capital “O”*. New Haven and London: Yale University Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisasi di Jawa 1912–1926*. Diterjemahkan oleh Hilman Farid. Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Simatupang, T.B. dan Lapian, A.B. “Pemberontakan di Indonesia: Mengapa dan Untuk Apa”, dalam *Prisma*, No. 7 Agustus 1978, hlm. 4.
- Sjahrir, Sutan. 2000. *Pikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Penerbit Jendela.
- Soehartono. 2000. “Transformasi Struktural Kasus di Desa Pengrembe”, dalam Dadang Juliantara (edy), *Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laperia Utama Pustaka.
- Suparlan, Parsudi. 1986. “Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan Jawa”, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta, LP3ES, 1986.
- Uhlin, Anders 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mizan.

Makalah

- Koehler, Sts. D Ulrich. 2006. “Fungsi-fungsi Demokratis Oposisi dalam Sistem Pemerintahan Parlementer Kerja Oposisi di dalam Aktivitas Keseharian Parlemen Jerman”. Ceramah ilmiah PDIP, 25 juli.
- Basir, Revrison. 2009. “Seminar tentang peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, pada 28 April 2009”, <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.a.c.id/makalahsembul.htm>.